

EDITORIAL

Dilema Industri Batu Bara

Ekspor batu bara anjlok. Badan Pusat Statistik (BPS) merekam ekspor emas hitam pada Januari—Juli 2025 hanya mencapai US\$13,82 miliar, turun 21,74% ketimbang periode yang sama tahun lalu yang tercatat US\$17,66 miliar.

Pelemahan permintaan dari China dan India jadi biang keladi. Maklum, kedua negara itu merupakan pangsa pasar terbesar untuk batu bara Indonesia.

Merujuk pada data Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) ekspor ke China turun 19,2% *year-to-date* (YTD) pada Juli 2025 lantaran produksi batu bara domestik China meningkat serta adanya percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Ekspor ke India juga tercatat melorot 8,8% YtD akibat pelemahan permintaan listrik dan gangguan musim monsun.

Dus, situasi itu bikin gundah pelaku usaha serta pemerintah. Bagi pengusaha, penurunan permintaan bakal berimbas ke pendapatan. Apalagi, pada

saat yang sama harga batu bara dunia sedang tak bertenaga. Harga rata-rata batu bara di tingkat global pada Januari—Juli mencapai US\$64,37 per ton, atau turun 9,64% secara kumulatif dari US\$71,24 per ton pada periode yang sama tahun lalu.

Tak hanya itu, pelaku usaha saat ini juga masih gundah dengan dampak aturan baru perihal kewajiban penggunaan harga patokan batubara (HPB) dan harga patokan mineral dalam transaksi penjualan batu bara dan mineral logam.

Beleid anyar itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara, yang diteken pada 8 Agustus 2025.

Pelaku usaha batu bara kebetaran dengan aturan tersebut lantaran harga acuan batu bara (HBA), yang digunakan sebagai perhitungan HPB, lebih tinggi

dibandingkan indeks harga batu bara lainnya. Alhasil, permintaan pun berpotensi menyusut.

Selama ini, kebanyakan pembeli batu bara dari Indonesia mengacu pada Indonesia Coal Index (ICI) yang merupakan acuan harga mingguan batu bara Indonesia di pasar domestik dan internasional.

Tak cuma terjadi di kalangan pengusaha, dilema juga dialami pemerintah. Penurunan ekspor batu bara berpotensi merembet ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Faktanya, batu bara merupakan kontributor terbesar PNBP sektor minerba. Menurut data Kementerian ESDM, realisasi PNBP minerba sepanjang Januari-Juli 2025 mencapai Rp76,9 triliun, di mana batu bara menyumbang Rp39 triliun.

Dalam jangka pendek, ada baiknya pemerintah dan pelaku usaha kembali duduk bersama untuk merumuskan strategi kebijakan yang lebih adaptif.

Namun jika ditilik lebih jauh, fenomena yang terjadi saat ini seharusnya dapat menjadi

momentum untuk mereview kembali industri ini. Kita tidak dapat menutup mata, bahwa sektor batu bara mulai redup seiring dengan tuntutan transisi energi baik di tingkat global maupun domestik.

Sudah saatnya pelaku usaha memikirkan diversifikasi bisnis yang dapat membuka peluang baru. Demikian pula bagi pemerintah, yang harus kembali konsisten dengan *road map* transisi energi agar tak melulu tergantung pada komoditas batu bara.

Dalih bahwa penerimaan dari batu bara dapat membiayai transisi energi juga perlu ditinjau kembali. Karena pada tahap tertentu, bisa jadi strategi itu justru kontraproduktif karena dapat memicu ekspansi yang tidak terkontrol.

Pada gilirannya produksi malah makin menumpuk dan berdampak pada permintaan, seperti yang terjadi saat ini. Selain itu, risiko yang jauh lebih besar adalah kerusakan lingkungan yang makin parah akibat ekstraksi yang tidak terkontrol. ■